

“Menguatkan Sinergitas Komunitas Sekolah dan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana; Pembelajaran dari Aceh”

Muslem Daud¹, Muhammad Nur^{2, 3}, Adil Syahputra³,
Faisal Ilyas⁴, Nasir Nurdin⁵, & Hasan Di Bangka⁶

Abstrak

Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara komunal dengan memberikan perhatian pada kaum rentan. Sekolah memiliki komunitas besar untuk diselamatkan, dan memiliki kaum rentan terbanyak, yaitu siswa-siswi. Di satu sisi, sekolah punya program Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB), dan di sisi lain desa punya inisiatif Desa Tangguh Bencana. Ke dua program dimaksud dapat disnergikan sehingga dapat saling mengisi. Komite sekolah dapat menjembatani kepentingan ini karena mereka memiliki akses langsung ke sekolah dari satu sisi, dan di sisi lain mereka adalah penduduk, dan mungkin perangkat desa setempat.

Peran komite sekolah dimulai dari peningkatan pemahaman komite sekolah sendiri terhadap isu-isu kebencanaan dan praktek Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sehingga mereka dapat berperan aktif menjembatani kepentingan SMAB ke dalam rancangan dan program Desa Tangguh Bencana; baik itu berkaitan dengan jalur evakuasi, akses ke titik aman, dan seterusnya.

Pengalaman PRB di Pidie Jaya Aceh paska gempa Desember 2016, sinergitas komunitas sekolah dan masyarakat sudah berjalan, namun belum menunjukkan kolaborasi yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurangnya kapasitas komite sekolah itu sendiri dan kurangnya informasi perencanaan Desa Tangguh Bencana dari desa lokasi sekolah berada. Pembinaan-pembinaan diperlukan baik itu berkaitan dengan komunitas sekolah, khususnya komite sekolah dan juga keterbukaan informasi Desa Tangguh Bencana. Sehingga peran komite sekolah lebih maksimal, dan PRB sekolah sekaligus PRB keseluruhan komunitas desa dapat tercapai.

Kata Kunci: *Sekolah Aman Bencana; Desa Tangguh Bencana; Forum PRB Aceh*

Corresponding Author: Muslem Daud: Email: muslemdaud@yahoo.com

Artikel ini dipaparkan pada Konferensi Nasional PRBBK XIII Mataram 12-14 September 2017

Citation: Daud, M., Nur, M., Syahputra, A., Ilyas, F., Nurdin, N., & Bangka, H.D. (2017). *Menguatkan Sinergitas Komunitas Sekolah dan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana; Pembelajaran dari Aceh*. Mataram. Konferensi Nasional PRBBK XIII

¹ Dosen Universitas Serambi Mekkah dan Wakil Ketua II Forum PRB Aceh

² Dosen Universitas Serambi Mekkah dan Anggota Forum PRB Aceh Bidang Pendidikan Teknologi Kebencanaan

³ Koordinator Forum PRB Aceh Bidang Pemberdayaan SDM Kebencanaan

⁴ Koordinator Forum PRB Aceh Bidang Pendidikan-Teknologi Kebencanaan

⁵ Ketua Forum PRB Aceh dan Ketua RAPI Aceh

⁶ Sekretaris Forum PRB Aceh dan Ketua Forum PRB Banda Aceh

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dipandang sebagai hal yang mutlak (BNPB: 2012a; UNDP: 2016). Hal ini disebabkan karena masyarakatlah yang menjadi komunitas besar untuk diselamatkan atau akan menjadi korban dalam setiap musibah. Salah satu komunitas terbesar dalam masyarakat adalah komunitas sekolah, dan selebihnya adalah komunitas masyarakat yang tersebar dan beraktifitas untuk mencari penghidupan dengan berbagai pekerjaan dan profesi mulai dari petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri di berbagai kantor, dan seterusnya.

Komunitas sekolah terdiri dari kelompok rentan yaitu siswa-siswi sekolah yang punya jumlah signifikan (Margaretha: 2011), disamping para guru, administrator sekolah, komite sekolah yang mungkin pada saat musibah berada di lingkungan sekolah. Jumlah komunitas sekolah ini dapat saja berkali lipat jika sekolah terletak di kota, pemukiman padat penduduk ataupun sekolah favorit.

Besarnya jumlah komunitas sekolah dikaitkan dengan risiko bencana yang kemungkinan dihadapi membutuhkan perhatian (Kemendikbud: 2016). Selain pelaksanaan program Sekolah Madrasah Aman Bencana di sekolah, perangkat komite sekolah dapat menjadi representasi komunitas sekolah dengan perangkat desa di mana sekolah berada. Hal ini bukan saja untuk menyukseskan SMAB tetapi juga memberikan nilai positif terhadap program Desa Tangguh Bencana (Kemendikbud-Unicef: 2015). Ide ini terkesan ideal dan pada kenyataannya, perlu pembenahan-pembenahan baik dari pihak komunitas sekolah, khususnya komite sekolah dan juga dari pihak desa, khususnya berkaitan dengan informasi Desa Tangguh Bencana.

Dalam tulisan singkat ini, turut dikemukakan beberapa pengalaman di Aceh, khususnya paska gempa Pidie Jaya 7 Desember 2016 lalu. Kajian lebih mendalam dibutuhkan, sehingga dapat diformulasikan sebagai strategi ke depan dalam kerangka menciptakan sekolah aman bencana dalam bingkai Desa Tangguh Bencana.

Pembahasan

SMAB dan Peran Komite Sekolah

Pelaksanaan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB) membutuhkan kerjasama berbagai pihak (lintas sektor), dan ini merupakan hal yang mendasari SMAB (Kemendikbud: 2016). Selanjutnya, dalam petunjuk Kemendikbud (2016) disebutkan bahwa prinsip-prinsip SMAB adalah: berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB), inklusif (tidak ada anak dan komunitas sekolah yang ditinggalkan) dan ramah anak.

Secara teknis, Lesmana (2015) menyebutkan bahwa paling kurang ada 7 langkah PRB untuk sekolah yaitu: pengidentifikasian ancaman; pembentukan komite penyelamatan; penerapan jalur komunikasi; perencanaan penyelamatan; dan penyebaran informasi dan pengetahuan penyelamatan. Langkah-langkah disebutkan akan membuka jalan untuk mitigasi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Untuk menjalankan langkah-langkah ini dapat dilakukan oleh komunitas sekolah, mulai kepala sekolah, guru, dan juga komite sekolah.

Peran Komite sekolah pada dasarnya adalah suatu keharusan karena peran mereka bagian tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan pendidikan Indonesia (UU Sisdiknas: 2003), termasuk di dalamnya memberikan rasa aman sehingga siswa siswi dapat belajar dengan baik. Sejalan dengan ide ini, dalam buku panduan Modul 3 Pilar 3 - Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (Kemendikbud-Unicef: 2015) disebutkan bahwa komite sekolah (dan orang tua peserta didik) adalah subjek penting dalam PRB di sekolah/ madrasah. Dua subjek lainnya adalah sekolah itu sendiri dan yang ke tiga adalah pemerintah.

Supaya komite sekolah dapat berperan aktif, maka kerjasama Kemendikbud dengan BNPB telah melaksanakan pilot projek di 80 sekolah dan dilaporkan berhasil. Salah satu aktifitas penting adalah penerapan SMAB, dan pelatihan komunitas sekolah dan juga aparatur desa dilakukan secara bersama-sama (Kemendikbud: 2015). Ini menjadi *lesson learnt* (pelajaran penting) bahwa integrasi komunitas sekolah dan desa penting. Apalagi diperkuat oleh petunjuk-petunjuk teknis, termasuk Kemensos (2011) dan juga langkah teknis PRB yang diusulkan Lesmana (2016) di atas.

Desa Tangguh Bencana

Dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan (BNPB: 2012a). Perka BNPB ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial sebelumnya, tentang Kampung Siaga Bencana (KSB) di mana desa/ kampung/ lurah menjadi tempat aman bagi semua masyarakat (Kemensos: 2011).

Sementara itu, untuk mewujudkan target Desa Tangguh Bencana 5000 di tahun 2019 (BNPB: 2016), maka desa-desa perlu mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Ketangguhan dimaksud juga meliputi seluruh komunitas yang ada dalam desa, dan tidak ada yang ditinggalkan (Margaretha: 2011).

Karenanya, koordinasi penuh berbagai lini dapat meminimalisir kendala dihadapi PRB (Kementerian PPN/ Bappenas: 2016). Selanjutnya disebutkan bahwa prinsip PRB Desa Tangguh Bencana antara lain prinsip partisipatoris, keberpihakan pada kelompok rentan, inklusif (menyeluruh), lintas sektor, kemitraan, dan hak semua masyarakat sekaligus pelaku PRB bagi yang tinggal dalam wilayah desa dimaksud (BNPB: 2012a). Ini berarti bahwa PRB adalah tanggung jawab bersama dan hal ini sejalan dengan konsep SMAB yang dijalankan oleh Kemendikbud (dan juga Kementerian Agama-Kemenag). Bahwa komunitas sekolah yang ada dalam wilayah desa dimaksud berhak mendapatkan akses kepada kegiatan PRB di desa. Tinggal lagi bagaimana mengorganisir potensi sekolah seperti komite sekolah dan potensi desa, seperti aparatur desa (Kemendikbud: 2015), Taruna Siaga (Kemensos: 2011), para sukarelawan (Supianto: 2015) dan unsur lainnya untuk dapat bersinergi.

Disamping itu, akses jalan desa dan ruang terbuka hijau yang diamanahkan oleh Permendagri Nomor 114 (2014) dan Permendes PDTT Nomor 21 (2016a) selaras dengan konsep Desa Tangguh Bencana. Salah satu dimensi penting dalam yang menjadi acuan dalam Index Desa Membangun adalah dimensi Ekologi. Penilaian dimensi ini ditujukan pada indikator: kualitas lingkungan meliputi ada tidaknya pencemaran lingkungan; dan ada tidaknya potensi rawan bencana dan tanggap bencana (Permendes PDTT: 2016b).

Dengan demikian, hampir semua kebijakan pemerintah sudah tanggap bencana dan kepada perangkat desa dapat mengambil inisiatif menjadikan desa mereka sebagai Desa Tangguh Bencana. Tinggal lagi pelaksana di lapangan hingga tingkat perangkat desa untuk menjalankannya dengan benar, terbuka, dan saling berkoordinasi termasuk dengan komunitas sekolah, sehingga desa aman dan kompetensi desa tangguh bencana dapat terwujud.

Pengalaman Menghadapi dan Simulasi Bencana di Sekolah di Aceh

Aceh hampir mempunyai berbagai pengalaman kebencanaan, seperti gempa yang diikuti tsunami (BNPB: 2012b), gempa Gayo 2013, dan terakhir gempa Pidie Jaya 2016 lalu. Di Aceh terdapat istilah kebencanaan '*Smong*' yang berarti Tsunami (Atjeh Post: 2014). Hanya saja, istilah ini tidak dikenal luas oleh masyarakat Aceh sebelumnya, kecuali bagi masyarakat pulau Simeulue. Hal ini pula yang boleh jadi menjadi penyebab mengapa korban Tsunami 2004 lalu begitu banyak, sementara untuk pulau korban di pulau Simeulue sendiri angkanya tergolong minim (BNPB: 2012b). Tiga gempa besar di atas, telah diikuti pula oleh gempa-gempa susulan karena dipengaruhi letaknya di atas lempeng tektonik Australasia, Pasifik, Eurasia dan Filipina (Kemendikbud: 2016) dan kemungkinan pengaruh *Ring of Fire* (BNPB:

2016). Sehingga gunung Seulawah Agam dianggap aktif dan terus dipantau. Suatu ketika boleh jadi akan mengeluarkan semburan bara api.

Sedangkan musibah banjir dan kebakaran hutan dua hal yang cukup memprihatinkan. Pembakaran hutan dan lahan gambut telah menjadi petaka karena asap yang menyelimuti pemukiman penduduk dan juga kota (BPBA: 2017). Eksploitasi hutan berlebihan juga telah menyebabkan banjir bandang ketika curah hujan tinggi tidak sanggup diserap oleh bebatang kayu kayu tersisa. Sementara itu, eksploitasi tambang tidak beraturan, telah menyebabkan pencemaran lingkungan serta dikhawatirkan mengakibatkan berbagai penyakit akibat zat kimia pembuangan.

Memperhatikan tantangan dan intensitas bencana dihadapi, seharusnya ke 6 jenis bencana (gempa, tsunami, gunung berapi, kebakaran, banjir, dan pencemaran lingkungan) perlu dantisipasi. Namun dalam catatan penulis, penguatan kesiapsiagaan bencana di sekolah lebih banyak difokuskan pada paling kurang 4 keadaan yaitu gempa, tsunami, kebakaran dan banjir. Sementara, simulasi-simulasi bencana yang dilakukan disesuaikan dengan lokasi dimana letak sekolah. Untuk sekolah yang letaknya jauh dari laut, maka biasanya tidak dilakukan simulasi tsunami tetapi berfokus pada gempa, kebakaran dan banjir saja.

Dalam perspektif kenbencanaan di Aceh, terdapat banyak lembaga yang melakukan program kesiapsiagaan di sekolah baik itu lembaga pemerintah, swasta, forum peduli bencana dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga dimaksud pun bervariasi mulai lokal, nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaannya, mereka ada yang beintegrasi dengan pemerintah lokal dan dinas terkait seperti dinas pendidikan dan kementerian agama, namun ada juga yang langsung berinteraksi dengan target *beneficiaries* (penerima manfaat).

Hal menarik ingin disampaikan adalah pengalaman PRB, kesiapsiagaan dan simulasi bencana paska gempa di Pidie Jaya Aceh 2016 lalu, di mana hampir semua lembaga-lembaga dimaksud bersatu menyukseskan program ini. Pemerintah daerahpun mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub Pidie Jaya: 2017) untuk menguatkan aturan pelaksana sehingga sekolah dan madrasah benar-benar aman bagi siswa (Berita Lima: 2017).

Simulasi bencana yang dilakukan secara periodik telah melibatkan lebih dari 80 sekolah hingga Juli 2017. Peran serta lembaga sosial pendukung sangat kentara seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) sehingga dapat menjadi *best practice* (praktek baik) PRB. Hanya saja berdasarkan pengamatan penulis, keterlibatan komite sekolah di beberapa sekolah dipandang masih minim. Padahal, dalam semua aturan sebagaimana dijelaskan di atas dan juga Perbub jelas-jelas menyebutkan bahwa komite sekolah punya porsi penting dalam SMAB. Kapasitas komite sekolah dipandang masih kurang.

Sementara itu peran masyarakat, khususnya perangkat desa, dipandang masih belum maksimal karena pemahaman mereka terhadap inisiatif Desa Tangguh Bencana pun masih perlu perhatian. Berkaitan dengan pelaksanaan Perbub, hingga artikel ini ditulis sekretariat formal yang diamanahkan Perbub belum dapat dijalankan karena masih terkendala pendanaan. Di sisi lain, keterlibatan instansi pemerintah terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masih belum maksimal karena terkendala anggaran.

Kegiatan simulasi bencana di sekolah ini masih terus dilanjutkan oleh dinas pendidikan propinsi dengan melibatkan lembaga lokal. Informasi terakhir didapat, kegiatan simulasi ini juga sudah diperlebar ke kabupaten/kota lainnya seperti Lhoksumawe (Aceh Antara News: 2017). Sementara itu, kiprah Forum PRB Aceh dalam pengurangan resiko bencana sudah berekselerasi dengan merangkul semua pihak, termasuk dunia usaha (Harian Serambi Indonesia: 2017). Ke depan, salah satu fokus utama forum adalah SMAB sebagaimana tertuang dalam program prioritas Forum PRB Aceh tahun anggaran 2018 tahun depan (FPRB Aceh: 2017).



Direktur PPKLK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Jakarta (Ir. Sri Renani Pantjastuti MPA, posisi tengah berjilbab) diapit oleh penulis dan Kepala Dinas Pendidikan Pidie Jaya (Saiful, M.Pd, sebelah kanan berkaca mata) serta tim pelaksana lainnya dalam acara sosialisasi Perbub No 11 Tahun 2017 di Kantor Bupati Pidie Jaya (Sumber: Berita Lima: 2017).

Menguatkan Sinergitas Komunitas Sekolah dan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana

Sebagaimana digambarkan dalam diskusi di atas bahwa salah satu tujuan utama dari kesiapsiagaan bencana adalah mengantisipasi dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya masyarakat dan kaum rentan dari musibah yang mungkin terjadi. Beranjak dari tujuan ini, maka semua pihak diharapkan proaktif mengurangi resiko bencana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Daud: 2017).

Memperhatikan realita bahwa masing-masing individu yang hidup dalam komunitas disatukan oleh pekerjaan, kegiatan sehari-hari, kepentingan, kecendrungan, dan seterusnya.

Namun untuk pengurangan resiko bencana, semua stratifikasi tersebut diharapkan hilang dan semua disatukan oleh kepentingan yang lebih besar yaitu selamat bencana dengan risiko minimal (Siregar: 2012; Supianto: 2015). Karenanya, penyatuan kepentingan untuk PRB ini memerlukan mekanisme pengelolaan yang baik sehingga satu dengan lainnya akan saling bersinergi dan saling memperkuat sehingga membuahkan hasil yang maksimal (UNDP: 2012), seperti bersinerginya komunitas sekolah dengan masyarakat sekitar dalam PRB baik pra, sedang maupun paska bencana.

Perlu menjadi catatan bahwa, kebersamaan dalam PRB hampir sulit berjalan maksimal, jika belum terdapat kesamaan pemahaman bencana dari sebelum bencana terjadi. Karenanya, komunikasi, diskusi awal dan penyebaran informasi, simulasi bersama sangat diperlukan (Kementerian PPN/ Bappenas: 2016; Daud: 2017). Sehingga masing-masing komunitas tahu apa, mengapa, dengan siapa, bagaimana dan melakukan apa dan seterusnya ketika kontribusi mereka dibutuhkan.

Dalam hal sinergitas sumber daya komunitas sekolah dan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana, maka komite sekolah dianggap pilar paling penting karena komite sekolah terdiri dari orang tua siswa siswi satu sisi, dan disisi lain komite sekolah berasal dari desa dan pemukiman sekitar sekolah (Kemendikbu-Unicef: 2015; Kemendikbud: 2016). Artinya, komite sekolah dapat masuk ke dalam dua sisi; sekolah dan desa sekaligus. Peran ini akan semakin penting, maka kala komunitas sekolah adalah eksklusif sehingga terkadang komite sekolah menjadi satu-satunya jalur komunikasi antara sekolah dengan masyarakat.

Di sisi lain, dengan adanya program Desa Tangguh Bencana (BNPB: 2012a) yang sejalan dengan berbagai program lainnya seperti Index Desa Membangun oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2016a; 2016b), peraturan Kemendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan seterusnya, maka program-program PRB dapat dilaksanakan. Hal yang terpenting dilakukan adalah dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga dan instansi lain yang punya kegiatan hampir serupa sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri (Kementerian PPN/ Bappenas: 2016). Kerena itu, perangkat desa sebagai tataran paling bawah dalam pelaksanaan kegiatan supaya melibatkan komunitas sekitar desa guna menyukseskan program tangguh bencana dimaksud. Sementara para pengambil kebijakan supaya selalu memonitor pelaksanaan kegiatan ini untuk memaksimalkan output dan tercapainya indikator kegiatan (Kementerian PPN/ Bappenas: 2016).

Dalam hal ini, komite sekolah berperan penting dan dapat menjembatani kepentingan sekolah. Akan sangat beruntung jika ada di antara para komite sekolah duduk sebagai perangkat

desa sehingga dapat mensinkronkan program SMAB ke dalam program Desa Tangguh Bencana dan juga sebaliknya.

Secara perundangan, memang hal ini telah menjadi mandat, namun dalam praktek masih dibutuhkan pembenahan-pembenahan. Hal ini terlihat masih banyak rumah sekolah yang belum ada jalur evakuasi ke satu titik aman dalam sebuah pemukiman. Belum lagi letak rumah sekolah sudah dikurung oleh pemukiman padat penduduk, sehingga menyulitkan proses evakuasi pada saat saat '*golden time*' penyelamatan. Mobil pemadam kebakaran pun terkadang sulit menjangkau lokasi sekolah padat penduduk. Tata ruang desa masih banyak yang belum mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disetujui, atau malah RTRWnya belum ada sama sekali. Sementara itu, masih terdapat sekolah yang terletak di pinggir sungai dan kerap dilanda banjir; ada juga sekolah yang *space* terbuka sudah tidak ada lagi semua lahan sekolah sudah didirikan bangunan, sedangkan lahan relokasi belum tersedia. Hal-hal ini juga menjadi kendala, bukan saja menghambat terwujudnya Desa Tangguh Bencana tetapi menjadi kendala bagi SMAB.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Beranjak dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah memainkan peran penting dalam menjadikan sekolah madrasah sebagai tempat yang aman bagi para siswa-siswi khususnya, dan komunitas sekolah pada umumnya. Dalam program PRB dan juga situasi bencana, komite sekolah dapat menjembatani antara komunitas sekolah yang akan diamankan menuju titik-titik evakuasi terdekat di suatu desa/ pemukiman. Peran lainnya adalah menjadi penghubung dalam berbagai perencanaan dan inisiatif Desa Tangguh Bencana untuk menempatkan komunitas sekolah menjadi salah satu prioritas yang akan diselamatkan. Hal ini mengingat di sana terdapat kelompok rentan yaitu siswa-siswi sekolah yang butuh perhatian lebih besar.

Di samping itu, komite sekolah juga dapat berperan sebagai penghubung antara desa dengan sekolah dalam hal kebijakan/ keputusan desa berkaitan dengan mitigasi bencana, baik hal itu berkaitan dengan jalur evakuasi, titik berkumpul, dan seterusnya. Dengan demikian jika musibah seperti gempa, tsunami, banjir-tanah longsor, kebakaran dan juga mungkin gunung berapi serta bencana dari pencemaran lingkungan terjadi, maka pihak sekolah dan desa dapat mengurangi resiko secara bersama-sama.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi disampaikan bahwa komite sekolah untuk memperkuat diri dengan pemahaman kebencanaan dan dapat berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu pihak desa untuk selalu melibatkan pihak sekolah yang dapat diwakili oleh komite sekolah dalam inisiatif dan program Desa Tangguh Bencana. Karenanya, direkomendasikan supaya komite sekolah perlu ikut serta dalam berbagai kegiatan PRB di sekolah dan juga di desa. Di samping itu, penyebaran informasi kepada semua anggota komite sekolah perlu dilakukan. Sehingga jika musibah terjadi, program penyelamatan dan pengurangan resiko bencana tidak dilakukan oleh hanya masing-masing wali murid dan hanya untuk anak-anak mereka sendiri, tetapi terintegrasi dalam program SMAB dan masyarakat desa. Untuk mencapai ini semua, sinergitas komunitas sekolah, khususnya komite sekolah, dengan masyarakat khususnya perangkat desa perlu diperkuat, menuju SMAB dan juga Desa Tangguh Bencana. Semoga!.

Daftar Kepustakaan

- Atjeh Post. (2014). Smong dari Simeulue Diusulkan Menggantikan Istilah Tsunami. Sumber: <http://atjehpost.co/berita2/read/smong-dari-simeulue-diusulkan-menggantikan-istilah-tsunami>
- Aceh Antara News. (2017). *Sekolah di Lhoksumawe Ikut Simulasi Siaga Bencana*. Sumber: <http://aceh.antaranews.com/berita36690/sekolah>
- Berita Lima. (2017). *Direktur PPKLK Apresiasi Perbub Sekolah Madrasah Aman Bencana Pidie Jaya*. Sumber: <https://www.beritalima.com/2017/04/29/direktur-ppklk-apresiasi-perbub-sekolah-madrasah-aman-bencana-pidie-jaya/>
- Bupati Pidie Jaya. (2017). *Peraturan Buapti Pidie Jaya. Nomor 11 Tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana*. Merdu. Sekretariat Kantor Bupati Pidie Jaya.
- BNPB. (2012a). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta. BNPB
- BNPB. (2012b). *Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami*. Jakarta. BNPB
- BNPB. (2016). *Karakteristik dan Kebutuhan Daerah Di Kabupaten Rawan Bencana* . Jakarta. BNPB
- BPBA. (2017). *Informasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Beberapa Wilayah Di Aceh (Kondisi Per 26 Juli 2017)*. B. Aceh. BPBA
- Daud., M. (2017). *Menguatkan Sinergitas Pengurangan Resiko Bencana*. Ppt. Diskusi Publik PRB. Banda Aceh. Universitas Serambi Mekkah
- Forum PRB Aceh. (2017). *Dokumen Usulan Program Forum PRB Aceh 2018*. Banda Aceh. Forum PRB Aceh
- Habibullah. (2013). *Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh*. Jakarta. Jurnal Informasi Vol. 18, No. 02 hal 133-150 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI.
- Harian Serambi Indonesia. (2017). *IOM-Forum Gelar Workshop Dunia Usaha*. Sumber: <http://aceh.tribunnews.com/amp/2017/07/19/iom-forum-gelar-workshop-dunia-usaha>

- International Organization for Migration-IOM. (2014). *Penguatan Kapasitas dalam Manajemen Bencana dan Ketahanan Komunitas: Jawa Barat dan Aceh*. Jakarta. IOM
- Kemendagri (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta. Kemendagri
- Kemendes PDTT. (2016a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta. Kemendes PDTT
- Kemendes PDTT. (2016b). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta. Kemendes PDTT.
- Kemendikbud. (2003). *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20, Tahun 2003*. Jakarta. Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2015). *Roadmap Sekolah/Madrasah Aman*. Jakarta. Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2016). *Petunjuk Teknis Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (SMAB) bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta. Kemendikbud
- Kemendikbud-Unicef. (2015). *Modul 3 Pilar 3 - Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta. Kemendikbud
- Kemensos. (2011). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana*. Jakarta. Kemensos
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2016). *Laporan: Akhir Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana untuk Mendukung UU No. 24 Tahun 2007*. Jakarta. Kementerian PPN/ Bappenas
- Lasmana, U. D. (2015). *Sudah Amankan Sekolah Anak Anda?*. Tangerang. Lasmana.
- Margaretha, M. (2011). *Disabilitas dalam Ketangguhan: Berangkat dari Sumberdaya yang Belum Termanfaatkan*. Jakarta. ASB Indonesia
- Siregar, N. (2012). *Implementasi Making Aceh Safer Trough Disaster Risk Reduction in Development (DRR-A) Project Oleh United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana di Aceh 2009-2012*. Banda Aceh. eJournal Ilmu Hubungan Internasional.2017,5(3)775-788
- Supianto, Y.A. (2015). *Membangun Kemandirian Melalui Desa Tangguh Bencana*. Garut. BPBD Jawa Barat.
- United Nations Development Programme -UNDP. (2012). *Making Aceh Safer through Disaster Risk Reduction in Development (DRR-A)*. Jakarta. UNDP.